

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian pada Bab I hingga Bab III terkait penerapan akuntansi belanja dan beban operasional pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. KPPN Jakarta IV secara umum telah menerapkan akuntansi belanja dan beban operasional sesuai dengan ketentuan terkait SAP yang berlaku, mulai dari tahap definisi dan klasifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.
2. Selama periode tahun 2020, KPPN Jakarta IV telah beberapa kali melakukan revisi DIPA awalnya. Hal tersebut dikarenakan adanya instruksi dari pusat untuk melakukan penghematan belanja serta perubahan kegiatan menyesuaikan dengan kebutuhan dan situasi pandemi. Kebijakan tersebut kemudian mengharuskan terjadinya perubahan mata anggaran pada beberapa jenis belanja, yakni belanja barang dan jasa serta belanja perjalanan dinas dalam rangka penanganan pandemi Covid-19.
3. Sebagai satker yang murni memberikan pelayanan berkaitan dengan proses pencairan anggaran, KPPN Jakarta IV tidak memiliki belanja operasional yang beragam. Belanja tersebut hanya berupa belanja pegawai dan belanja barang.

Belanja pegawai pada KPPN Jakarta IV terdiri dari belanja gaji dan tunjangan PNS serta belanja lembur. Sedangkan belanja barangnya terdiri dari belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dalam negeri, dan belanja barang persediaan barang konsumsi.

4. Terdapat penurunan realisasi belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang yang masing-masing penurunannya sebesar 15,87% dan 4,99% dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa penurunan belanja pegawai tersebut diakibatkan adanya beberapa pegawai yang pensiun dan/atau mutasi. Sementara penurunan belanja barang diakibatkan adanya kebijakan optimalisasi serta realokasi belanja yang tidak terpakai hingga akhir tahun untuk penanganan pandemi Covid-19 pada KPPN Jakarta IV.